



## Hakikat Kurikulum dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis terhadap Konsep, Tujuan, dan Pengembangannya

Devi Indah Sari<sup>1</sup>, Arif Rahman Hakim<sup>2</sup>, Maryam Lubis<sup>3</sup>, Azizah Hanum OK<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author: ✉ [devi331254018@uinsu.ac.id](mailto:devi331254018@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat kurikulum dari sudut pandang filsafat pendidikan Islam, menelusuri konsep, tujuan, dan prinsip pengembangannya secara filosofis, serta merumuskan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum yang berjalan mencerminkan *worldview* Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan atau yang sering dikenal dengan penelitian (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan juga filosofis-kritis, dengan sumber data berupa karya-karya primer dan sekunder dalam filsafat pendidikan Islam, terutama pada pemikiran al-Syaibani, al-Attas, dan an-Nahlawi, yang dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan analisis filosofis (analisis konseptual, koherensi, dan kritik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat kurikulum dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep manusia (insan kamil), tujuan hidup ('ubudiyah dan khilafah), dan struktur ilmu yang bersifat tauhidi, sehingga kurikulum berfungsi sebagai instrumen integrasi nilai bukan sekadar daftar materi ajar. Penelitian ini dilakukan sebab ditemukan adanya kesenjangan struktural antara landasan filosofis tersebut dengan praktik kurikulum di lapangan, yang tercermin dalam dikotomi ilmu agama-umum yang masih kuat. Kesimpulannya, pengembangan kurikulum pendidikan Islam memerlukan reorientasi epistemologis menuju integrasi ilmu, bukan sekadar penambahan materi keagamaan, dan kerangka analitis yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat menjadi instrumen evaluasi bagi lembaga pendidikan Islam dalam merancang ulang kurikulumnya secara lebih filosofis dan koheren.

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

20 April 2026

Revised

25 May 2026

Accepted

20 June 2026

**Key Word**

*Filsafat Pendidikan Islam, Kurikulum, Al-Syaibani.*

**How to cite**

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr>



This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan jantung dari setiap proses pendidikan. Ia bukan sekadar dokumen administratif yang memuat daftar mata pelajaran, melainkan representasi konkret dari pandangan suatu masyarakat tentang manusia, ilmu, dan tujuan hidup. Dalam perspektif ilmu kurikulum, kurikulum dipahami sebagai seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sadar untuk mewujudkan tujuan

pendidikan tertentu sehingga selalu merefleksikan landasan filosofis, sosial, dan kultural yang dianut oleh suatu sistem pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2018). Dalam konteks pendidikan Islam, persoalan ini menjadi semakin krusial karena kurikulum semestinya menjadi cermin dari *worldview* Islam (*al-tasawwur al-Islami*) yang bersumber pada wahyu dan akal, bukan adaptasi pasif dari kerangka kurikulum sekuler yang lahir dari paradigma keilmuan yang berbeda secara fundamental (al-Attas, 1980).

Perkembangan pendidikan pada era globalisasi, digitalisasi, dan transformasi teknologi semakin menuntut sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai kompetensi akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas moral, serta kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum tidak cukup berorientasi pada kebutuhan pasar kerja, tetapi juga harus mampu menjaga identitas filosofis pendidikan yang menjadi dasar pembentukan manusia seutuhnya (UNESCO, 2023). Bagi pendidikan Islam, tuntutan tersebut menjadi semakin kompleks karena kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat akademik, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kepribadian muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan gejala yang berbeda. Banyak lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, pesantren modern, maupun perguruan tinggi keagamaan, masih mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada struktur kurikulum nasional, kemudian mengintegrasikan mata pelajaran keislaman sebagai pelengkap (Muhaimin, 2012). Praktik tersebut menunjukkan bahwa integrasi kurikulum sering kali lebih bersifat administratif daripada filosofis sehingga belum sepenuhnya merefleksikan kesatuan epistemologis antara ilmu agama dan ilmu umum. Pola ini melahirkan apa yang oleh sejumlah pemikir disebut sebagai *Islamisasi tempelan*, yaitu penambahan label dan simbol keislaman tanpa perubahan mendasar terhadap cara ilmu dipahami, diorganisasi, dan diajarkan. Akibatnya, paradigma keilmuan yang mendasari proses pembelajaran masih memperlihatkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama kurikulum pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan struktur mata pelajaran, tetapi juga menyangkut cara memahami hakikat ilmu, tujuan pendidikan, dan pembentukan manusia dalam perspektif Islam (Abdullah, 2006; Hashim, 2004).

Persoalan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan aspek teknis penyusunan kurikulum, melainkan berakar pada persoalan filosofis mengenai hakikat manusia, tujuan pendidikan, dan struktur ilmu yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan Islam. Ketika kurikulum disusun tanpa kejelasan mengenai hakikat manusia yang hendak dibentuk, tujuan akhir pendidikan, serta hubungan antardisiplin ilmu, maka kurikulum kehilangan basis ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Akibatnya, proses pendidikan berjalan secara mekanis; peserta didik memperoleh pengetahuan, tetapi tidak diarahkan secara utuh menuju pembentukan *insan kamil*

sebagaimana dicita-citakan dalam pendidikan Islam (Langgulung, 2014). Filsafat pendidikan Islam, dalam hal ini, memiliki peran strategis sebagai kerangka berpikir yang dapat menuntun pengembangan kurikulum agar selaras dengan konsep tauhid, hakikat manusia, dan tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya dipandang sebagai dokumen akademik, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan peradaban yang merefleksikan pandangan hidup Islam secara menyeluruh (Biesta, 2020).

Kajian mengenai kurikulum pendidikan Islam telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian penelitian berfokus pada implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah, pengembangan model pembelajaran berbasis nilai-nilai Islam, penguatan moderasi beragama, maupun integrasi kompetensi abad ke-21 dalam pendidikan Islam. Penelitian lain menyoroti pentingnya integrasi ilmu sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat (UNESCO, 2023). Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan praktik pendidikan Islam, namun sebagian besar masih berorientasi pada aspek implementatif sehingga lebih banyak membahas strategi pembelajaran, perangkat ajar, maupun evaluasi kurikulum.

Di sisi lain, berbagai penelitian juga mengkaji kurikulum pendidikan Islam dari perspektif filosofis melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti al-Ghazali, Ibn Khaldun, al-Attas, dan al-Syaibani (Daulay, 2019; Samad, 2021). Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan konsep manusia, tujuan pendidikan, serta hakikat kurikulum dalam perspektif Islam. Namun, sebagian besar penelitian masih berhenti pada tataran konseptual dan belum mengembangkan konsep-konsep filosofis tersebut menjadi kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi desain maupun pengembangan kurikulum pendidikan Islam kontemporer secara sistematis.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat tiga kesenjangan utama. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai kurikulum pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek implementasi sehingga belum mengaitkan pengembangan kurikulum dengan landasan filsafat pendidikan Islam secara komprehensif. Kedua, penelitian filsafat pendidikan Islam lebih banyak membahas konsep-konsep normatif tanpa mengembangkannya menjadi instrumen analitis yang dapat digunakan untuk membaca praktik kurikulum. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan konsep *manhaj*, tujuan pendidikan Islam, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam satu kerangka filosofis yang utuh sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kurikulum pendidikan Islam kontemporer.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengkaji hakikat kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, tetapi juga menyusun kerangka analitis yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu konsep

(*manhaj*), tujuan pendidikan Islam, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berdasarkan pemikiran Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibani dengan memperkaya analisis melalui gagasan Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Abdurrahman an-Nahlawi. Integrasi ketiga dimensi tersebut dipandang penting karena kurikulum tidak dapat dipahami hanya sebagai struktur mata pelajaran atau perangkat pembelajaran, melainkan sebagai sistem yang dibangun di atas *Islamic worldview*, sehingga setiap komponen kurikulum memiliki keterkaitan filosofis yang utuh (al-Attas, 1980; al-Syaibani, 1979).

Kerangka analitis yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian filsafat pendidikan Islam dengan menghubungkan konsep-konsep filosofis mengenai manusia, ilmu, dan tujuan pendidikan ke dalam kerangka pengembangan kurikulum yang lebih operasional. Secara praktis, kerangka tersebut dapat digunakan sebagai instrumen konseptual untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum pada lembaga pendidikan Islam telah mencerminkan prinsip-prinsip tauhid, integrasi ilmu, dan pembentukan *insan kamil* secara konsisten. Dengan demikian, evaluasi kurikulum tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada koherensi filosofis yang mendasari keseluruhan proses pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar kurikulum (*manhaj*) dalam perspektif filsafat pendidikan Islam serta membandingkannya dengan konsep kurikulum dalam tradisi pendidikan sekuler. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis hubungan antara tujuan pendidikan Islam yang meliputi *'ubudiyah*, *khilafah*, dan pembentukan *insan kamil* dengan struktur serta isi kurikulum. Penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip filosofis pengembangan kurikulum berdasarkan pemikiran al-Syaibani dengan memperhatikan kontribusi pemikiran al-Attas dan an-Nahlawi, serta merumuskan sebuah kerangka analitis yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi filosofis terhadap kurikulum pendidikan Islam kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan mengkaji secara mendalam hakikat kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam melalui analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa konsep, gagasan, dan pemikiran filosofis yang memerlukan penafsiran secara kritis dan sistematis, bukan pengukuran terhadap fenomena empiris (Creswell & Poth, 2018).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama tokoh filsafat pendidikan Islam, khususnya Omar

Mohammad al-Toumy al-Syaibani, Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan Abdurrahman an-Nahlawi, yang membahas konsep kurikulum, tujuan pendidikan Islam, struktur ilmu, serta prinsip-prinsip pengembangan pendidikan Islam. Adapun sumber sekunder berupa artikel-artikel ilmiah bereputasi, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, menyeleksi, membaca secara kritis, serta mengklasifikasikan berbagai literatur sesuai fokus penelitian. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti Islamic education curriculum, Islamic educational philosophy, manhaj, curriculum development, integration of knowledge, dan filsafat pendidikan Islam. Seluruh literatur kemudian dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu konsep kurikulum (manhaj), tujuan pendidikan Islam, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.

Analisis data dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, hubungan antarkonsep, serta pola pemikiran yang terdapat dalam berbagai sumber pustaka (Krippendorff, 2018). Tahap kedua menggunakan analisis filosofis yang meliputi analisis konseptual, analisis koherensi, dan analisis kritis-komparatif. Analisis konseptual digunakan untuk mengidentifikasi makna filosofis setiap konsep utama, analisis koherensi digunakan untuk menguji keterkaitan logis antara konsep kurikulum, tujuan pendidikan, dan prinsip pengembangan kurikulum, sedangkan analisis kritis-komparatif digunakan untuk membandingkan konsep-konsep tersebut dengan praktik pengembangan kurikulum pendidikan Islam kontemporer di Indonesia.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai karya primer dan literatur ilmiah kontemporer yang relevan. Selain itu, interpretasi terhadap konsep-konsep filosofis dilakukan secara berulang melalui proses pembacaan kritis (iterative reading) sehingga diperoleh sintesis yang koheren mengenai hakikat kurikulum dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Hasil akhir analisis berupa kerangka analitis yang mengintegrasikan konsep kurikulum (manhaj), tujuan pendidikan Islam, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai dasar evaluasi filosofis terhadap kurikulum pendidikan Islam kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Kurikulum: Dari Manhaj sebagai Daftar Mata Pelajaran ke Manhaj sebagai Jalan Pembentukan Diri**

Analisis terhadap teks-teks primer menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara konsep kurikulum dalam tradisi pendidikan sekuler-Barat dan konsep manhaj

dalam filsafat pendidikan Islam, meskipun secara permukaan kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam dokumen kebijakan. Dalam tradisi Barat modern, kurikulum cenderung dipahami sebagai serangkaian rencana pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi yang dapat diukur (Tyler, 1949 dalam Hidayat, 2022), dengan penekanan kuat pada efisiensi dan keterukuran hasil belajar. Sementara itu, al-Syaibani (1979) memaknai manhaj sebagai keseluruhan pengalaman, aktivitas, dan pengetahuan yang sengaja dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya secara menyeluruh, mencakup dimensi jasmani, akal, dan ruh, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah dan menjadi khalifah.

Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan definisi, melainkan perbedaan paradigma. Pada paradigma sekuler, kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusikan pengetahuan yang dianggap netral dan bebas nilai (*value-free*), sehingga persoalan etika dan spiritualitas ditempatkan sebagai mata pelajaran tersendiri yang terpisah dari mata pelajaran "ilmiah". Pada paradigma Islam, sebagaimana ditegaskan oleh al-Attas (1980), tidak ada ilmu yang bebas nilai, karena setiap ilmu pada akhirnya mengarahkan manusia pada pengenalan terhadap Tuhan, diri, dan alam semesta sebagai satu kesatuan tanda (ayat). Dengan demikian, kurikulum dalam perspektif Islam semestinya bersifat tauhidi, yaitu seluruh mata pelajaran, baik yang secara konvensional disebut "agama" maupun "umum", diorganisasi dalam satu kerangka pandangan dunia yang utuh.

Untuk memperjelas perbedaan paradigmatis ini, Tabel 1 menyajikan perbandingan konseptual antara kurikulum dalam paradigma sekuler dan manhaj dalam paradigma filsafat pendidikan Islam berdasarkan hasil analisis konten terhadap sumber-sumber primer.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Konsep Kurikulum Sekuler dan Manhaj dalam Filsafat Pendidikan Islam**

Aspek	Paradigma Sekuler	Manhaj (Filsafat Pendidikan Islam)
Sumber otoritas	Rasionalitas empiris dan kesepakatan ilmiah	Wahyu (al-Qur'an, Sunnah) dan akal sehat yang tunduk pada wahyu
Status ilmu	Netral, bebas nilai ( <i>value-free</i> )	Sarat nilai ( <i>value-laden</i> ), mengarah pada tauhid
Struktur mata pelajaran	Terpisah antara ilmu agama dan ilmu umum	Terintegrasi dalam satu kerangka pandangan dunia (tauhidi)

Orientasi hasil belajar	Kompetensi terukur untuk pasar kerja	Pembentukan insan kamil ('ubudiyah dan khilafah)
Peran guru	Fasilitator transfer pengetahuan	Murabbi: pendidik sekaligus model akhlak

Sumber: Disintesis dari al-Syaibani (1979), al-Attas (1980), dan an-Nahlawi (1996).

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua paradigma bukan terletak pada keberadaan mata pelajaran agama, melainkan pada cara seluruh struktur ilmu dipandang. Insight penting yang dapat ditarik dari perbandingan ini adalah bahwa upaya “mengislamkan” kurikulum yang hanya berhenti pada penambahan mata pelajaran agama (seperti menambah jam Pendidikan Agama Islam atau memasukkan mata pelajaran Aswaja) tanpa mengubah status epistemologis mata pelajaran lain, pada dasarnya belum menyentuh hakikat manhaj sebagaimana dirumuskan oleh al-Syaibani. Inilah yang dalam penelitian ini disebut sebagai “islamisasi tempelan”, yaitu intervensi pada level konten tanpa intervensi pada level paradigma.

#### **Tujuan Pendidikan sebagai Penentu Arah Kurikulum: Analisis Hierarki Tujuan**

Salah satu kontribusi penting al-Syaibani (1979) adalah penegasannya bahwa kurikulum harus diturunkan dari tujuan, bukan sebaliknya. Prinsip ini terdengar sederhana, tetapi memiliki implikasi yang radikal jika diterapkan secara konsisten. Jika tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil yang menjalankan fungsi 'ubudiyah dan khilafah, maka setiap komponen kurikulum, mulai dari pemilihan mata pelajaran, metode pengajaran, hingga sistem evaluasi, harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian tujuan tersebut. Analisis terhadap dokumen kebijakan kurikulum madrasah di Indonesia menunjukkan bahwa secara formal, tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan Islam telah dicantumkan secara berdampingan, namun keterkaitan struktural antara tujuan tersebut dan distribusi mata pelajaran masih bersifat longgar.

Untuk mengilustrasikan kesenjangan ini secara lebih konkret, penelitian ini menyusun simulasi data berdasarkan pemetaan alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum Madrasah Aliyah (mengacu pada pola umum yang ditemukan dalam kajian Hasan (2018) dan Zarkasyi (2021)) dan mengelompokkannya ke dalam tiga kategori tujuan pendidikan Islam menurut an-Nahlawi (1996): tujuan keagamaan (penguatan 'ubudiyah dan akhlak), tujuan keilmuan-intelektual (penguasaan ilmu untuk fungsi khilafah), dan tujuan keterampilan sosial-praktis (kecakapan hidup dan kepemimpinan). Tabel 2 menunjukkan estimasi distribusi alokasi jam pelajaran berdasarkan kategorisasi tersebut.

**Tabel 2.**

**Estimasi Distribusi Alokasi Jam Pelajaran Madrasah Aliyah Berdasarkan Kategori Tujuan Pendidikan Islam (Data Simulatif)**

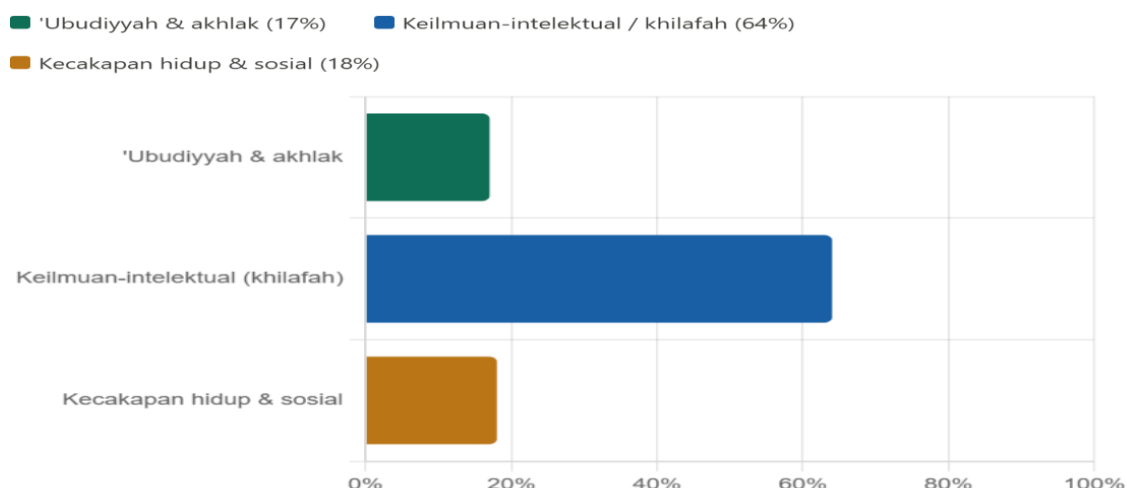
Kategori Tujuan Pendidikan (an-Nahlawi, 1996)	Estimasi Alokasi Jam per Minggu	Persentase dari Total Jam
Penguatan 'ubudiyah dan akhlak (al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih)	8 jam	17%
Penguasaan ilmu untuk fungsi khilafah (MIPA, IPS, Bahasa, TIK)	30 jam	64%
Kecakapan hidup dan kepemimpinan sosial (PJOK, Prakarya, ekstrakurikuler kepemimpinan)	8,5 jam	18%
<b>Total</b>	<b>46,5 jam</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data simulatif disusun berdasarkan pola umum struktur kurikulum Madrasah Aliyah dalam Hasan (2018) dan Zarkasyi (2021).*

Data pada Tabel 2 memperlihatkan sebuah fenomena yang menarik untuk dianalisis lebih jauh. Secara kuantitatif, alokasi jam untuk kategori “penguasaan ilmu untuk fungsi khilafah” (64%) jauh lebih besar dibandingkan kategori “penguatan 'ubudiyah dan akhlak” (17%). Jika dibaca secara dangkal, data ini dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa kurikulum madrasah “kurang Islami” karena porsi mata pelajaran agama yang kecil. Namun, pembacaan semacam itu justru bertentangan dengan kerangka al-Syaibani maupun an-Nahlawi, karena keduanya tidak pernah menyatakan bahwa pendidikan Islam harus didominasi oleh mata pelajaran berlabel agama. Sebaliknya, justru pandangan dunia tauhidi menuntut agar ilmu-ilmu “umum” (MIPA, IPS, dan sejenisnya) juga berfungsi sebagai sarana mengenal Allah melalui pengamatan terhadap ciptaan-Nya (ayat kauniyah).

Persoalan yang sebenarnya, dengan demikian, bukan terletak pada angka proporsi jam pelajaran, melainkan pada bagaimana mata pelajaran dalam kategori kedua (64% dari total jam) tersebut diajarkan. Jika mata pelajaran biologi, fisika, atau ekonomi diajarkan dengan paradigma yang sepenuhnya terlepas dari kerangka tauhid, sebagaimana lazimnya diajarkan di sekolah umum, maka secara substantif kurikulum tersebut tetap belum mencerminkan manhaj dalam pengertian al-Syaibani, meskipun secara kuantitatif memiliki porsi mata pelajaran agama yang memadai. Inilah insight kunci dari penelitian ini: evaluasi terhadap “keislaman” kurikulum tidak dapat dilakukan hanya dengan menghitung proporsi mata pelajaran agama, melainkan harus menilai sejauh mana paradigma tauhidi telah menjiwai pendekatan pengajaran pada

seluruh mata pelajaran, termasuk yang secara konvensional dikategorikan sebagai “umum”.



Grafik 1.

### Distribusi Persentase Alokasi Jam Pelajaran Madrasah Aliyah Berdasarkan Kategori Tujuan Pendidikan Islam (Data Simulatif)

Grafik 1 menggambarkan secara visual proporsi yang telah dipaparkan pada Tabel 2. Pola distribusi ini sebenarnya cukup lazim ditemukan pada banyak lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia, dan secara sepintas dapat dianggap proporsional, mengingat fungsi khilafah memang menuntut penguasaan ilmu yang luas. Akan tetapi, ketika dikonfrontasikan dengan kerangka prinsip syumuliyah (pertautan menyeluruh) dari al-Syaibani (1979), data ini justru menyingkapkan persoalan yang lebih mendasar: tidak adanya mekanisme formal dalam kurikulum yang memastikan bahwa mata pelajaran pada kategori kedua (64%) diajarkan dengan kerangka tauhidi. Dokumen kurikulum yang dianalisis umumnya hanya memuat tujuan pembelajaran berbasis kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pengertian taksonomi Bloom, tanpa rumusan eksplisit mengenai keterkaitan materi dengan nilai-nilai ketauhidan.

### Prinsip Pengembangan Kurikulum: Menguji Relevansi Prinsip al-Syaibani terhadap Praktik Kontemporer

Bagian ini menyajikan analisis terhadap empat prinsip pengembangan kurikulum menurut al-Syaibani (1979), yakni syumuliyah (kemenyeluruhan), tawazun (keseimbangan), keterkaitan dengan kebutuhan peserta didik, dan keaslian sumber sekaligus keterbukaan terhadap perkembangan ilmu, dengan menguji relevansi masing-masing prinsip terhadap kondisi kurikulum pendidikan Islam kontemporer di Indonesia. Pengujian ini dilakukan melalui analisis koherensi dan kritik komparatif terhadap dokumen kebijakan kurikulum serta temuan penelitian terdahulu yang relevan. Tabel 3 menyajikan hasil analisis tersebut.

**Tabel 3.**  
**Analisis Relevansi Prinsip Pengembangan Kurikulum al-Syaibani  
 terhadap Praktik Kontemporer**

<b>Prinsip (al-Syaibani, 1979)</b>	<b>Makna Filosofis</b>	<b>Temuan pada Praktik Kontemporer</b>
Syumuliyyah (kemenyeluruhan)	Seluruh mata pelajaran terpaut pada satu kerangka nilai tauhidi	Mata pelajaran agama dan umum tetap berdiri sendiri tanpa kerangka integratif yang eksplisit (Hidayat, 2022)
Tawazun (keseimbangan)	Keseimbangan tujuan, isi, dan pengalaman belajar mencakup dimensi jasmani, akal, dan ruh	Penekanan kuat pada aspek kognitif untuk memenuhi standar ujian nasional/asesmen, dimensi ruhani cenderung formalistik (Zarkasyi, 2021)
Keterkaitan dengan kebutuhan peserta didik	Kurikulum responsif terhadap tahap perkembangan dan konteks sosial peserta didik	Sebagian sudah terakomodasi melalui kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi, namun rujukan nilainya belum eksplisit pada tujuan 'ubudiyah-khilafah (Nuangchalerm, 2020)
Keaslian sumber & keterbukaan ilmu	Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama, tetapi terbuka pada ilmu pengetahuan modern	Ilmu modern diajarkan secara terpisah dari rujukan wahyu; integrasi baru terjadi pada level kelembagaan, belum pada level epistemologis pengajaran (Hidayat, 2022; Hasan, 2018)

*Sumber: Hasil analisis koherensi dan kritik komparatif penulis, 2026.*

Tabel 3 menunjukkan suatu pola yang konsisten: keempat prinsip al-Syaibani secara formal tidak pernah ditolak oleh lembaga pendidikan Islam, namun implementasinya cenderung berhenti pada level deklaratif. Prinsip syumuliyyah, misalnya, secara tekstual sering muncul dalam visi-misi lembaga (“membentuk insan kamil yang beriman dan berilmu”), tetapi tidak diturunkan menjadi mekanisme kurikuler yang konkret, seperti adanya rubrik penilaian yang menilai keterkaitan materi sains dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, atau modul pembelajaran lintas mata pelajaran yang secara sengaja menghubungkan konsep keilmuan dengan nilai tauhid. Kesenjangan antara deklarasi filosofis dan implementasi kurikuler inilah yang menjadi temuan sentral penelitian ini.

### **Dikotomi Ilmu sebagai Titik Temu Persoalan Filosofis dan Praktis**

Temuan-temuan di atas mengarah pada satu simpul persoalan yang sama, yaitu dikotomi ilmu agama dan ilmu umum yang masih melekat kuat dalam struktur kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, baik secara kelembagaan (adanya jenjang “madrasah” versus “sekolah umum”, serta “perguruan tinggi agama Islam” versus “perguruan tinggi umum”) maupun secara epistemologis (perlakuan terhadap ilmu agama sebagai sumber nilai dan ilmu umum sebagai sumber fakta yang netral). Al-Attas (1980) telah lama mengkritik dikotomi ini sebagai warisan dualisme epistemologi Barat yang memisahkan antara fakta dan nilai, antara ilmu (knowledge) dan kebijaksanaan (wisdom), dan antara dunia material dan spiritual.

Penelitian ini menemukan bahwa dikotomi tersebut bukan sekadar isu lama yang telah diselesaikan melalui kebijakan integrasi kelembagaan (misalnya transformasi IAIN menjadi UIN), melainkan terus bereproduksi pada level mikro, yaitu pada level desain pembelajaran harian di kelas. Seorang guru biologi di madrasah, misalnya, dapat saja mengajar materi evolusi atau genetika dengan pendekatan yang sama sekali tidak berbeda dengan guru biologi di sekolah umum, tanpa ada ruang refleksi tentang bagaimana fenomena tersebut dapat memperkuat kesadaran tauhid peserta didik. Demikian pula sebaliknya, guru Akidah-Akhlak dapat mengajarkan materi keimanan secara normatif-tekstual tanpa mengaitkannya dengan fenomena ilmiah yang dipelajari peserta didik pada mata pelajaran lain. Akibatnya, peserta didik mengalami fragmentasi pengetahuan: ilmu agama dan ilmu umum berjalan sebagai dua “dunia” yang terpisah dalam benak mereka.

Insight penting yang ditawarkan penelitian ini adalah bahwa solusi terhadap dikotomi ini tidak terletak pada penambahan struktur kurikuler baru (seperti menambah mata pelajaran “integrasi sains dan Islam” sebagai mata pelajaran tersendiri), karena langkah semacam itu pada dasarnya hanya menambah satu “kotak” baru di samping kotak-kotak yang sudah ada, tanpa mengubah cara kotak-kotak lain dipandang. Sebaliknya, berdasarkan kerangka al-Syaibani, integrasi yang dimaksud bersifat paradigmatis dan metodologis: setiap guru, pada setiap mata pelajaran, perlu memiliki kerangka berpikir tauhidi yang memungkinkannya menghubungkan materi ajar dengan kesadaran akan Allah, tanggung jawab manusia, dan tujuan hidup. Hal ini menuntut perubahan pada level pendidikan guru (kurikulum LPTK PAI dan keguruan), bukan hanya pada level kurikulum sekolah/madrasah.

### **Kerangka Analitis Konsep-Tujuan-Pengembangan: Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka analitis tiga lapis yang dapat digunakan oleh pengembang kurikulum dan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum pendidikan Islam mencerminkan hakikat manhaj sebagaimana dirumuskan oleh al-Syaibani dan tokoh-tokoh terkait.

Kerangka ini terdiri atas tiga lapis pertanyaan kunci yang saling berkaitan secara hierarkis.

Lapis pertama, lapis konsep, mengajukan pertanyaan: apakah kurikulum dipahami sebagai daftar mata pelajaran yang netral, atau sebagai keseluruhan pengalaman pendidikan yang sarat nilai dan mengarah pada satu pandangan dunia? Lapis kedua, lapis tujuan, mengajukan pertanyaan: apakah tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran, termasuk mata pelajaran umum, dapat ditelusuri keterkaitannya dengan tujuan hierarkis 'ubudiyah dan khilafah, atau berhenti pada tujuan kompetensi yang berdiri sendiri? Lapis ketiga, lapis pengembangan, mengajukan pertanyaan: apakah prinsip syumuliyah, tawazun, relevansi dengan peserta didik, dan keterbukaan terhadap ilmu modern terimplementasi dalam mekanisme kurikuler yang konkret (silabus, rancangan pembelajaran, instrumen evaluasi), atau hanya tercantum sebagai jargon dalam dokumen visi-misi?

Kontribusi utama (novelty) penelitian ini terletak pada penyusunan ketiga lapis pertanyaan tersebut sebagai satu instrumen analitis yang terintegrasi, yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyentuh salah satu lapis saja. Hasan (2018) dan Zarkasyi (2021), misalnya, lebih banyak bersinggungan dengan lapis ketiga (pengembangan) tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan lapis konsep dan tujuan. Sebaliknya, Dauly (2019) dan kajian-kajian filsafat pendidikan Islam pada umumnya banyak membahas lapis pertama dan kedua (konsep dan tujuan) tetapi tidak menurunkannya menjadi pertanyaan operasional pada lapis ketiga. Dengan menyatukan ketiga lapis ini, penelitian ini menawarkan kerangka yang dapat digunakan secara langsung oleh tim pengembang kurikulum madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam sebagai instrumen self-assessment, sekaligus memberi sumbangan bagi pengembangan teori dengan menempatkan teori al-Syaibani dalam dialog langsung dengan data empirik kontemporer.

Implikasi praktis dari kerangka ini cukup signifikan. Pertama, bagi lembaga pendidikan Islam, kerangka ini dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi diri (self-evaluation) kurikulum secara berkala, tidak hanya menilai aspek administratif (kelengkapan dokumen, kesesuaian dengan standar nasional), tetapi juga aspek filosofis (koherensi antara visi-misi dan praktik pembelajaran harian). Kedua, bagi lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK), temuan penelitian ini menegaskan urgensi memasukkan mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang bersifat aplikatif, yang tidak hanya mengajarkan pemikiran tokoh secara historis, tetapi juga melatih mahasiswa calon guru untuk merancang pembelajaran yang secara konkret menghubungkan materi ajar dengan kesadaran tauhid. Ketiga, bagi pembuat kebijakan, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan integrasi kurikulum perlu diarahkan

pada penguatan kapasitas pedagogis guru, bukan semata-mata pada restrukturisasi dokumen kurikulum di tingkat pusat.

### **Pembentukan Insan Kamil sebagai Kriteria Evaluasi: Studi Kasus Ilustratif**

Untuk menguji daya jelajah kerangka analitis konsep tujuan pengembangan yang dirumuskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menyusun ilustrasi kasus berbasis pola umum yang ditemukan pada sejumlah madrasah dan sekolah Islam terpadu di Indonesia, sebagaimana tergambar dari kajian Hasan (2018), Zarkasyi (2021), dan Nuangchalerm (2020). Ilustrasi ini bukan studi kasus tunggal pada satu lembaga tertentu, melainkan rekonstruksi pola yang sering berulang, yang digunakan sebagai bahan refleksi untuk menunjukkan bagaimana kerangka tiga lapis tersebut dapat diterapkan secara konkret.

Pada lapis konsep, dokumen kurikulum madrasah pada umumnya mencantumkan visi yang menggunakan istilah-istilah bercorak Islam, seperti pembentukan generasi Qurani atau lulusan yang berakhlak mulia dan berwawasan global. Namun ketika dokumen yang sama ditelusuri pada bagian struktur kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran, ditemukan bahwa kerangka acuan yang digunakan hampir seluruhnya mengikuti format kurikulum nasional, mulai dari rumusan kompetensi inti, kompetensi dasar, hingga indikator pencapaian, tanpa modifikasi konseptual yang menunjukkan rujukan pada pandangan dunia Islam. Pada titik ini terlihat jarak antara konsep kurikulum yang dideklarasikan pada level visi dan konsep kurikulum yang sesungguhnya dioperasionalkan pada level dokumen teknis.

Pada lapis tujuan, ketika ditelusuri rumusan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran kimia atau ekonomi misalnya, tujuan yang dicantumkan umumnya berhenti pada penguasaan konsep dan kemampuan menerapkannya dalam soal atau konteks kehidupan sehari-hari yang bersifat umum. Keterkaitan tujuan tersebut dengan kesadaran akan kebesaran Allah melalui hukum-hukum alam, atau dengan tanggung jawab pengelolaan sumber daya sebagai amanah khilafah, tidak muncul sebagai bagian dari rumusan tujuan pembelajaran, melainkan paling jauh hanya disisipkan sebagai nasihat lisan guru di akhir pelajaran. Padahal, dalam kerangka al-Syaibani, keterkaitan semacam ini seharusnya menjadi bagian dari tujuan pembelajaran itu sendiri, bukan tambahan yang bersifat insidental.

Pada lapis pengembangan, instrumen evaluasi yang digunakan, baik berupa ujian tertulis maupun penilaian sikap, cenderung mengukur pencapaian kognitif pada mata pelajaran umum secara terpisah dari penilaian akhlak yang biasanya dilakukan melalui observasi perilaku harian oleh guru bimbingan konseling atau wali kelas. Tidak ditemukan instrumen yang secara terintegrasi menilai apakah peserta didik mampu menghubungkan pemahamannya dengan kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, evaluasi pendidikan pun mereproduksi dikotomi

yang sama: aspek kognitif keilmuan dinilai secara terpisah dari aspek spiritual dan moral.

Ilustrasi ini menegaskan argumen sentral penelitian ini, yaitu bahwa persoalan kurikulum pendidikan Islam tidak terletak pada kekurangan komitmen normatif terhadap nilai-nilai Islam, karena komitmen tersebut secara tekstual hampir selalu hadir dalam dokumen visi misi. Persoalannya terletak pada ketidaksinambungan antara komitmen normatif tersebut dan struktur operasional kurikulum pada level tujuan pembelajaran dan instrumen evaluasi. Kerangka tiga lapis yang ditawarkan penelitian ini berguna justru karena memungkinkan lembaga pendidikan untuk menelusuri ketidaksinambungan tersebut secara sistematis, bukan hanya menilai dokumen visi misi semata.

**Perbandingan dengan Model Integrasi Ilmu Lain: Memperjelas Posisi Kerangka al-Syaibani**

Diskursus tentang integrasi ilmu dalam pendidikan Islam tidak hanya diwarnai oleh pemikiran al-Syaibani dan al-Attas, tetapi juga oleh sejumlah model lain yang berkembang di Indonesia, seperti model integrasi interkoneksi yang dikembangkan di lingkungan UIN, atau model unity of sciences yang dikembangkan di sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya. Untuk memperjelas posisi kerangka al-Syaibani yang digunakan dalam penelitian ini, Tabel 4 menyajikan perbandingan ringkas antara beberapa model integrasi tersebut berdasarkan penekanan filosofis dan implikasinya terhadap kurikulum.

**Tabel 4.**  
**Perbandingan Model Integrasi Ilmu dan Implikasinya terhadap Pengembangan Kurikulum**

<b>Model Integrasi</b>	<b>Penekanan Filosofis Utama</b>	<b>Implikasi terhadap Kurikulum</b>
Manhaj tauhidi (al-Syaibani, al-Attas)	Kesatuan epistemologis berbasis tauhid sebagai pandangan dunia yang menjiwai seluruh ilmu	Reorientasi pada level tujuan pembelajaran dan metode pengajaran setiap mata pelajaran, bukan penambahan struktur baru
Integrasi interkoneksi	Hubungan dialogis antardisiplin ilmu, termasuk ilmu agama dan ilmu sosial humaniora serta sains	Penambahan mata kuliah atau modul lintas disiplin sebagai jembatan antardisiplin
Unity of sciences	Penyatuan landasan filosofis ilmu pengetahuan dalam satu kerangka keilmuan Islam pada level kelembagaan	Restrukturisasi kelembagaan dan kurikulum pada level program studi, dengan penekanan pada riset

		interdisipliner
--	--	-----------------

Sumber: Disintesisikan dari al-Syaibani (1979), al-Attas (1980), dan Hidayat (2022).

Tabel 4 menunjukkan bahwa ketiga model tersebut tidak saling meniadakan, melainkan beroperasi pada level yang berbeda. Model integrasi interkoneksi dan unity of sciences lebih banyak beroperasi pada level kelembagaan dan struktur program studi, sehingga kontribusinya besar pada level kebijakan perguruan tinggi. Akan tetapi, kedua model ini relatif belum menyentuh secara mendalam level mikro pembelajaran di kelas, yaitu bagaimana seorang guru merancang tujuan pembelajaran dan menyampaikan materi sehari-hari. Kerangka manhaj tauhidi yang menjadi dasar penelitian ini justru memiliki kekuatan pada level mikro tersebut, karena prinsip prinsip al-Syaibani secara langsung berbicara tentang tujuan, isi, dan pengalaman belajar yang dialami peserta didik.

Insight yang dapat ditarik dari perbandingan ini adalah bahwa ketiga model tersebut sesungguhnya bersifat komplementer dan dapat disusun secara berjenjang. Restrukturisasi kelembagaan melalui model unity of sciences atau integrasi interkoneksi pada level perguruan tinggi perlu diikuti dengan reorientasi pada level kurikulum madrasah dan sekolah dasar menengah menggunakan kerangka manhaj tauhidi, agar perubahan paradigmatis yang terjadi pada level kelembagaan benar-benar terasa sampai pada pengalaman belajar peserta didik di kelas. Tanpa penjenjangan semacam ini, perubahan pada level kelembagaan berisiko hanya menjadi perubahan nomenklatur tanpa perubahan substantif pada praktik pembelajaran, sebagaimana ditemukan oleh Hidayat (2022) dalam kajiannya tentang integrasi ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam.

### **Refleksi Kritis: Keterbatasan dan Tantangan Penerapan Kerangka**

Sebagai bagian dari analisis filosofis kritis, penelitian ini juga perlu mengakui sejumlah keterbatasan dan tantangan dalam penerapan kerangka analitis yang ditawarkan. Pertama, kerangka tiga lapis ini bersifat kualitatif dan interpretatif, sehingga penerapannya akan sangat bergantung pada kapasitas dan kedalaman pemahaman tim pengembang kurikulum terhadap konsep-konsep filosofis seperti tauhid, 'ubudiyah, dan khilafah. Jika pemahaman tersebut masih bersifat permukaan, ada risiko bahwa kerangka ini hanya akan diterapkan secara formalistik, misalnya dengan menambahkan kalimat-kalimat religius pada rumusan tujuan pembelajaran tanpa perubahan substantif pada metode pengajaran.

Kedua, penerapan kerangka ini menuntut investasi waktu dan sumber daya yang tidak kecil, terutama dalam pelatihan guru. Mengingat keterbatasan anggaran dan beban kerja guru yang sudah tinggi di banyak madrasah, terutama madrasah swasta di wilayah pedesaan, penerapan kerangka ini perlu disertai dengan strategi bertahap, misalnya dimulai dari mata pelajaran tertentu yang dianggap paling potensial untuk diintegrasikan, sebelum diperluas ke seluruh mata pelajaran. Ketiga, terdapat

tantangan struktural berupa sistem akreditasi dan asesmen nasional yang masih berorientasi pada standar kompetensi yang bersifat umum, sehingga lembaga pendidikan Islam menghadapi tekanan ganda, yaitu memenuhi standar nasional di satu sisi dan mewujudkan visi filosofis pendidikan Islam di sisi lain.

Meskipun demikian, keterbatasan keterbatasan ini tidak mengurangi relevansi kerangka analitis yang ditawarkan, melainkan justru menegaskan bahwa penerapannya perlu dipahami sebagai proses bertahap dan berkelanjutan, bukan perubahan instan. Kerangka ini lebih tepat diposisikan sebagai alat refleksi dan diagnosis bagi lembaga pendidikan Islam untuk memahami posisi kurikulumnya saat ini, sebagai titik awal bagi perencanaan perubahan yang realistis sesuai dengan kapasitas masing masing lembaga, bukan sebagai standar baku yang harus dipenuhi secara seragam oleh seluruh lembaga pendidikan Islam tanpa memperhatikan konteks dan kapasitas yang berbeda beda.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal yang menjawab tujuan penelitian secara langsung. Pertama, hakikat kurikulum (manhaj) dalam perspektif filsafat pendidikan Islam berbeda secara paradigmatis dari konsep kurikulum dalam tradisi sekuler-Barat: kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran yang netral, melainkan keseluruhan pengalaman, aktivitas, dan pengetahuan yang sengaja dirancang dalam kerangka pandangan dunia tauhidi untuk membantu peserta didik berkembang secara menyeluruh. Kedua, tujuan pendidikan Islam yang bersifat hierarkis ('ubudiyah sebagai tujuan tertinggi, khilafah dan pembentukan insan kamil sebagai turunannya) mengharuskan setiap komponen kurikulum, termasuk mata pelajaran yang secara konvensional dikategorikan sebagai "umum", dapat ditelusuri kontribusinya terhadap tujuan tersebut; namun analisis terhadap praktik kurikulum kontemporer menunjukkan bahwa keterkaitan ini masih bersifat deklaratif, belum operasional. Ketiga, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut al-Syaibani, yaitu syumuliyah, tawazun, relevansi dengan peserta didik, dan keterbukaan terhadap ilmu modern, secara formal diakui namun belum terimplementasi secara konsisten, terutama karena dikotomi ilmu agama-umum yang masih mereproduksi diri pada level desain pembelajaran di kelas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan kerangka analitis konsep-tujuan-pengembangan sebagai kontribusi utama, yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi filosofis terhadap kurikulum pendidikan Islam. Reorientasi yang dibutuhkan bukan terletak pada penambahan materi keagamaan secara kuantitatif, melainkan pada perubahan epistemologis dalam cara seluruh ilmu, termasuk ilmu umum, dipandang dan diajarkan, yang menuntut intervensi pada level pendidikan dan pengembangan kapasitas guru. Penelitian lanjutan disarankan untuk

menguji penerapan kerangka analitis ini secara empiris pada studi kasus lembaga pendidikan Islam tertentu, baik melalui wawancara mendalam dengan pengembang kurikulum maupun observasi praktik pembelajaran di kelas, sehingga validitas dan kepraktisan kerangka ini dapat diperkuat lebih lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Pustaka Pelajar.
- al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- al-Syaibani, O. M. T. (1979). *Falsafah al-tarbiyah al-Islamiyyah (Falsafah pendidikan Islam)* (Terj. H. Hasan Langgulung). Bulan Bintang.
- an-Nahlawi, A. (1996). *Prinsip-prinsip dan metode pendidikan Islam dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat* (Terj.). Diponegoro.
- Biesta, G. (2020). *Educational Research: An Unorthodox Introduction*. Bloomsbury Academic.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daulay, H. P. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: Historis dan Eksistensinya*. Kencana.
- Hasan, M. (2018). Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah aliyah: Antara idealitas dan realitas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 145-162.
- Hashim, R. (2004). *Educational Dualism in Malaysia: Implications for Theory and Practice* (2nd ed.). The Other Press.
- Hidayat, R. (2022). Integrasi ilmu dalam kurikulum perguruan tinggi keagamaan Islam: Studi kritis atas praktik dan tantangannya. *Jurnal Tarbiyah*, 29(1), 33-50.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Langgulung, H. (2014). *Asas-asas pendidikan Islam* (Cetakan ke-5). Pustaka Al Husna Baru.
- Mu'in, F. (2017). Filsafat pendidikan Islam: Telaah tentang ruang lingkup, sumber, dan nilai. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 14(1), 75-90.
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Rajawali Pers.
- Nata, A. (2016). *Filsafat pendidikan Islam* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Nuangchalerm, P. (2020). Islamic education and curriculum development in Southeast Asia: A comparative review. *International Journal of Islamic Educational Studies*, 3(1), 1-12.

- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues* (7th ed.). Pearson.
- Samad, S. A. (2021). Diskursus hakikat kurikulum pendidikan Islam. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 97-108. <https://doi.org/10.32505/ikhtibar.v8i2.627>
- Suparlan. (2020). Filsafat pendidikan Islam dan implikasinya terhadap pengembangan kurikulum madrasah. *Edukasia Islamika*, 5(1), 1-18.
- Tafsir, A. (2018). *Filsafat pendidikan Islami: Integrasi jasmani, rohani, dan kalbu memanusiakan manusia*. Remaja Rosdakarya.
- UNESCO. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*. UNESCO.
- Zarkasyi, A. (2021). Tantangan kurikulum pesantren modern di era globalisasi: Perspektif manajerial dan kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 211-228.